



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 617 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH,  
PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN,  
IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat melalui surat tanggal 10 Mei 2021 Nomor 384/-076.1, mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2021



a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. TANAH

No.	Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	302002	954,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Empang Bahagia IV-C, RT.3/RW.10, Jelambar, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat	1.350.864.000	
2	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	302003	948,30	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Empang bahagia 4 B RT.4/RW.10, Jelambar, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat	1.342.792.800	
3	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	302004	990,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Jelambar Madya 1, RW.10, Jelambar, Kec Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat	2.154.240.000	
4	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	302005	1.128,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Empang Bahagia V RT.1, Jelambar, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat	1.597.248.000	
5	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	302006	2.848,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Hemat RT.6/RW.3, Jelambar, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat	5.733.024.000	
6	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	300069	2.400,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Bakti Mulya, RT.7/RW.2, Tegal Alur, Kalideres, Kota Jakarta Barat	10.975.200.000	
7	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	300070	3.600,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Komp. Keberahan, RT.8/RW.10, Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat	16.462.800.000	
8	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	300071	2.400,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Manyar Raya RT.9/RW.2, Tegal Alur, Kalideres, Kota Jakarta Barat	10.975.200.000	
9	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	300072	5.400,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Manyar 1, RT.3/RW.11, Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat	24.694.200.000	
10	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	300073	3.000,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Manyar 2, RT.1/RW.11, Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat	13.719.000.000	
11	Tanah Untuk Jalan Propinsi	30504030000000	131010307002	300074	4.200,00	M2	-	Hibah	31-12-2000	Jl. Warung Pojok, RT.2/RW.2, Tegal Alur, Kalideres, Kota Jakarta Barat	19.206.600.000	

5561	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005554	335,10	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Jl. Lingkungan di RW. 06 Kel. Jelanbar Baru	79.815.400
5562	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005555	743,10	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Orang di RW.	157.525.200
5563	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005556	747,70	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Lingkungan d	244.437.400
5564	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005557	842,40	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Lingkungan d	282.139.600
5565	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005558	408,40	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Lingkungan d	142.431.600
5566	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005559	667,90	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Orang di RW.	131.845.470
5567	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005560	464,80	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Lingkungan d	152.879.659
5568	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005561	1.308,80	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Orang di RW.	255.885.600
5569	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005562	842,40	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Lingkungan d	274.879.600
5570	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005563	417,80	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Lingkungan d	145.622.100
5571	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005564	649,10	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Orang di RW.	128.166.900
5572	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005565	649,10	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Orang di RW.	137.306.840
5573	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005566	649,10	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Orang di RW.	325.376.800
5574	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005567	978,20	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Orang di RW.	210.798.995
5575	Jalan Propinsi Lokal	30504000000000	134010102003	005568	696,10	M <sup>2</sup>	882/1.795.12	PEMBELIAN/ APBD	10-10-2016	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman Ji. Orang di RW.	137.295.123



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS  
JAWA BARU  
KABUPATEN MARAU  
KANTOR WILAYAH DAERAH,  
LAH MATALI

MARU LAH MATALI